



**DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

Gedung MNC Tower Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No.17 – 19, Kota Jakarta Pusat.

Email: biroperencanaan@kek.go.id

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus
(Januari - Maret)**

Jakarta, April 2025

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK
 Triwulan I Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I	Capaian s.d. TW I (%)
<i>Perspektif: Stakeholder</i>					
1	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing				
1.1	Persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan KEK yang Berkualitas	%	90	70	77,8
<i>Perspektif: Customer</i>					
2	Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Layanan Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas				
2.1	Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Pembentukan KEK	indeks	3 (skala 4)	3,3	100
<i>Perspektif: Internal Business Process</i>					
3	Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas				
3.1	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	%	90	40	44,4
3.2	Persentase Pelaksanaan Evaluasi dan Kajian Pembentukan KEK yang Tepat Waktu	%	90	90	100
3.3	Persentase Penyelesaian Koordinasi Strategi Pengembangan dan Penetapan KEK	%	90	33	36,6
4	Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Rekomendasi Kualitas Kinerja Pelaksanaan Pengawasan Internal				

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I	Capaian s.d. TW I (%)
4.1	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	%	90	29	32
Perspektif: Learning and Growth					
5	Sasaran Kegiatan 5: Terwujudnya Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik				
5.1	Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK	indeks	3 (skala 4)	4,00	100

Kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing
----------	---

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing, ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: 1.1 Persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan KEK yang Berkualitas.

Capaian indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan KEK yang Berkualitas

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN. KEK yang sudah terbangun atau sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah harus melakukan *monitoring* evaluasi terhadap KEK yang dibentuk, karena hasil evaluasi tersebut akan terbentuk sebuah rekomendasi penetapan KEK.

Penyelesaian kajian pengusulan KEK yang berkualitas yaitu hasil kajian yang telah diselesaikan dan disetujui Sekretaris Jenderal Dewan Nasional. Perhitungan persentase penyelesaian kajian pengusulan KEK meliputi jumlah penyelesaian kajian pengusulan KEK dan hasil kajian yang disampaikan kepada Dewan Nasional. Perhitungan penyelesaian kajian pengusulan KEK yang masuk dari 1 Januari – 31 Oktober 2025.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja penyelesaian kajian pengusulan KEK yang berkualitas adalah 90%. Target tahun 2025 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 70%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian s.d TW I
IKU-1.1 Persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan KEK yang Berkualitas	%	90%	70%	77,78%

Indikator ini mengukur persentase penyelesaian kajian pengusulan KEK terhadap dokumen usulan KEK yang masuk. Selain itu, indikator ini juga mengukur persentase hasil kajian pengusulan KEK yang disetujui oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK terhadap hasil kajian pengusulan KEK yang disampaikan ke Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK. Capaian ini mencerminkan efektivitas fasilitasi pengusulan dan pembentukan KEK oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK. Capaian ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Penyelesaian kajian pengusulan KEK yang berkualitas} = \left(\frac{(\sum \text{penyelesaian kajian pengusulan KEK})}{(\sum \text{dokumen usulan KEK yang masuk})} \times 70\% \right) + \left(\frac{(\sum \text{hasil kajian yang disetujui Sekjen DN KEK})}{(\sum \text{hasil kajian yang disampaikan ke Sekjen DN KEK})} \times 30\% \right)$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2025, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen pengusulan KEK	Terlaksana	Telah dilakukan verifikasi kelengkapan atas 2 (dua) dokumen pengusulan KEK
2.	Verifikasi kebenaran dokumen pengusulan KEK	Terlaksana	Telah dilakukan verifikasi kebenaran dokumen terhadap 2 (dua) dokumen pengusulan KEK yang masuk
3	Melaporkan hasil kajian ke Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK	Terlaksana	Hasil evaluasi kesesuaian kriteria lokasi dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pengusulan KEK telah dilaporkan kepada

			Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK
--	--	--	--

Pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat dua usulan pembentukan KEK baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen usulan serta evaluasi kesesuaian lokasi untuk usulan KEK di Provinsi Kalimantan Selatan, disimpulkan bahwa dokumen yang diajukan belum memenuhi persyaratan kelengkapan yang diperlukan dan lokasi yang diusulkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, diketahui bahwa batas wilayah atau deliniasi dari usulan KEK berada pada beberapa zona peruntukan yang meliputi kawasan perkebunan, permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, serta kawasan yang direncanakan untuk pengembangan industri berskala besar. Namun demikian, terdapat ketidaksesuaian antara batas deliniasi wilayah KEK yang diusulkan dengan garis pantai sebagaimana tercantum dalam dokumen RTRW tersebut. Ketidaksesuaian ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan usulan KEK tersebut belum dapat dinyatakan lengkap dan sesuai dalam tahap evaluasi ini.

Pada usulan pembentukan KEK di Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa dokumen usulan yang disampaikan belum lengkap sesuai dengan PP 40/2021. Kedua usulan pembentukan KEK baru tersebut telah dikaji oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK. kajian kelayakan menyatakan bahwa kedua usulan KEK tersebut belum memenuhi persyaratan pembentukan KEK, sehingga dokumen tersebut dikembalikan kepada pengusul.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I Tahun 2025, belum terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan KEK yang Berkualitas berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

2 Sasaran Program 2. Terwujudnya Layanan Biro Pembentukan KEK yang Berkualitas

Pencapaian sasaran program 2: Terwujudnya Layanan Pembentukan KEK yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satuan indikator kinerja yaitu dengan Indeks layanan kepuasan Perencanaan dan Pembentukan KEK.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Pembentukan KEK

Latar Belakang

Kawasan ekonomi khusus merupakan salah satu instrumen strategis dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional. KEK dirancang untuk memberikan berbagai macam fasilitas dan kemudahan dalam menunjang dan mendorong peningkatan investasi dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan tata kelola yang efektif, efisien dan transparan, terutama dalam membangun kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha pengusul dan pembangun, serta

kementerian/lembaga terkait. Dalam hal ini, biro perencana dan pembentukan kawasan ekonomi khusus bertanggung jawab untuk memastikan proses identifikasi, pengusulan, dan penetapan KEK dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penilaian terhadap layanan perencanaan dan pembentukan KEK sangat penting untuk dapat mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja biro perencana dan pembentukan KEK merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan kinerja dari perspektif *customer*. Layanan yang diberikan oleh Biro mencakup persyaratan; sistem mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis layanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan; serta sarana dan prasarana.

Indeks kepuasan layanan digunakan sebagai metode evaluasi untuk mengukur kualitas pelayanan yang diselenggarakan, seperti kejelasan prosedur, kecepatan pelayanan, serta kemudahan dalam mengakses informasi. Pada Triwulan I tahun 2025, penyusunan Indeks Kepuasan Layanan fasilitas perencanaan dan pembentukan KEK telah dilaksanakan, dengan ringkasan hasil sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja kepuasan perencanaan dan pembentukan KEK sebesar 3,3 dari skala 4 yang pada tahun 2025, tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Pada triwulan I tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sesuai target yang terealisasi sebesar 3,3 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian s.d TW I
IKU 2.1 Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Pembentukan KEK	Indeks	3,1 (skala 4)	3,3	100%

Indeks kepuasan layanan perencanaan dan pembentukan KEK dihitung berdasarkan hasil survei yang disampaikan kepada Badan usaha Pembangunan dan Pengelola dan kementerian lembaga, dengan mempertimbangkan layanan utama. Nilai akhir indeks diperoleh melalui perhitungan rumus sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Pembentukan KEK

$$= \sum (\text{Nilai unsur survei kepuasan masyarakat rata-rata} \times \text{bobot})$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan survei pelayanan perencanaan dan pembentukan KEK	Terlaksana	Pada periode triwulan I dilakukan pembagian survei layanan kepuasan kepada Badan Usaha Pengusul dan pembangun KEK
2	Survei pelaksanaan koordinasi antar Kementerian/Lembaga	Terlaksana	Pada periode triwulan I dilakukan pembagian survei pelaksanaan koordinasi kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2025 Biro Perencana dan Pembentukan Kek telah melakukan penyusunan survei layanan dan koordinasi, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan biro. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan indeks kepuasan layanan perencanaan dan pembentukan KEK sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I 2025, terdapat kendala atau hambatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendalanya berupa ketidaksesuaian waktu pelaksanaan pengumpulan survei yang disebabkan karena perubahan prioritas kegiatan dan terbatasnya pegawai di Biro Perencana dan Pembentukan KEK.

3

Sasaran Program 3. Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 3: Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas, ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yang terdiri dari:

- 3.1 Persentase Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK
- 3.2 Persentase Pelaksanaan Evaluasi dan Kajian Pembentukan KEK yang Tepat Waktu
- 3.3 Persentase Penyelesaian Koordinasi Strategi Pengembangan dan Penetapan KEK

Capaian indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh

Dewan Nasional

karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN.

Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi pada seluruh rangkaian kegiatan Dewan Nasional. Selain itu, Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus juga bertugas untuk mengkoordinasikan dan menyusun rencana kinerja program dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Koordinasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan dengan tujuan untuk sinkronisasi program dan rencana kerja seluruh unit di bawah Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu, finalisasi dalam kegiatan perencanaan anggaran juga dibutuhkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus untuk mendukung pelaksanaan kinerja program dan kegiatan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional adalah 90%. Target tahun 2025 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 40% dari target 90% pada Tahun 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian s.d. TW I
IKU-3.1 Persentase Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	%	90%	40%	44,45%

Indikator ini mengukur perencanaan kinerja dan kebijakan pada program dan anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Kinerja dan kebijakan yang direncanakan yang menjadi siklus satu tahun anggaran antara lain:

- Penyusunan Rencana Kerja Setjen DN KEK 2025
- Penyusunan Rencana Kerja Setjen DN KEK 2026
- Penyusunan RKA Setjen DN KEK 2026
- Penyusunan KAK dan RAB Setjen DN KEK 2026
- Penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK 2025-2029
- Penyusunan KPJM 2025-2029
- Penyusunan PK Setjen DN KEK 2025

- Penyusunan Lakip Setjen DN KEK TW I-IV 2025

Capaian indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ perencanaan kinerja dan kebijakan} = \sum \text{kinerja dan kebijakan yang diselesaikan} \times \text{ bobot}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2025, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan rencana kerja Setjen DN KEK 2025	Terlaksana	Telah disusun <i>dashboard</i> rencana kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Tahun 2025. Penyusunan dilakukan dengan melalui rapat internal Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK maupun Bersama dengan unit kerja biro dan administrator lingkup Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
2	Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Tahun 2025	Terlaksana	Telah disusun perjanjian kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Tahun 2025 beserta UKE II dan Administrator KEK.
3	Penyusunan Lakip Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK TW 1 Tahun 2025	Terlaksana	Telah disusun laporan kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK TW 1 Tahun 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilaksanakan berbagai kegiatan koordinasi antar unit kerja biro dan administrator yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK. Kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2025 dengan topik yang meliputi *monitoring* capaian kinerja anggaran Setjen DN KEK tahun 2022-2024, *monitoring* capaian kinerja utama Setjen DN KEK tahun 2024, dan Kebijakan Penganggaran Setjen DN KEK tahun 2025.

Selain itu, telah dilaksanakan juga kegiatan yang berkaitan dengan Pembahasan Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan

Nasional KEK Tahun 2025-2029 pada tanggal 14 Januari 2025 dengan topik yang meliputi kerangka rencana strategis 2025-2029 dan penyepakatan target kinerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I Tahun 2025, belum terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan persentase Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional pada Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

3.2 Persentase Pelaksanaan Evaluasi dan Kajian Pembentukan KEK yang Tepat Waktu

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN. KEK yang sudah terbangun atau sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah harus melakukan *monitoring* evaluasi terhadap KEK yang dibentuk, karena hasil evaluasi tersebut akan terbentuk sebuah rekomendasi penetapan KEK.

Fasilitasi pembentukan KEK adalah metrik pengukuran penyelesaian fasilitasi pembentukan KEK. Fasilitasi ini mencakup serangkaian langkah tindak lanjut yang dilakukan terhadap permohonan audiensi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berminat mengetahui tentang KEK. Dalam hal ini, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK berperan aktif sebagai fasilitator dengan memberikan berbagai bentuk dukungan, salah satunya melalui penyelenggaraan audiensi. Kegiatan tersebut ditujukan kepada para pengusul, baik dari pemerintah daerah, badan usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya, yang ingin memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai prosedur, persyaratan, dan manfaat dari pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan demikian, fasilitasi ini tidak hanya menjadi bentuk respons administratif, tetapi juga bagian dari upaya strategis untuk memperluas pemahaman dan minat terhadap pengembangan KEK di berbagai wilayah.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pelaksanaan evaluasi dan kajian pembentukan kek yang tepat waktu adalah 90%. Target tahun 2025 tersebut berdasarkan pada Rencana

Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 90% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian s.d. TW I
IKU-3.2 Persentase Pelaksanaan Evaluasi dan Kajian Pembentukan KEK yang Tepat Waktu	%	90%	90%	100%

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase jumlah permohonan audiensi yang diajukan oleh para pengusul KEK yang kemudian ditindaklanjuti oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK, baik melalui pelaksanaan audiensi secara langsung maupun melalui bentuk tindak lanjut lainnya yang relevan. Tingkat capaian dari indikator ini mencerminkan sejauh mana efektivitas biro dalam menindaklanjuti setiap permohonan yang masuk. Capaian ini dihitung dengan menggunakan rumus tertentu, yang dirancang untuk menilai rasio antara jumlah permohonan yang difasilitasi dengan total permohonan yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Adapun rumus perhitungan capaian tersebut adalah sebagai berikut:

$$\% \text{Fasilitasi Pembentukan KEK Tepat Waktu} = \left(\frac{(\Sigma \text{tindak lanjut usulan KEK})}{(\Sigma \text{permohonan audiensi oleh pengusul})} \times 100\% \right)$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2025, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1.	Melakukan audiensi usulan pembentukan KEK dengan pengusul	Terlaksana	Telah dilaksanakan audiensi dengan pengusul terkait usulan pembentukan KEK.
2.	Menyampaikan laporan hasil audiensi kepada Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK	Terlaksana	Audiensi yang telah dilaksanakan selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK melalui nota dinas.

Pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat 7 (tujuh) permohonan audiensi terkait pembentukan KEK baru. Audiensi dan fasilitasi yang diselenggarakan meliputi terkait rencana pembentukan KEK hingga persiapan operasional usulan KEK. Tindak lanjut audiensi untuk penyusunan laporan hasil audiensi yang selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK.

**3.3 Persentase
Penyelesaian
Koordinasi
Strategi
Pengembangan
dan
Penetapan
KEK**

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I 2025 belum terdapat kendala yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan kegiatan tindak lanjut atas permohonan audiensi usulan pembentukan KEK. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang berstandar internasional, tentunya memerlukan adanya rekomendasi perkembangan dan pembentukan KEK yang baru. Dengan adanya UUCK, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dapat diinisiasi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan kajian rekomendasi wilayah yang berpotensi, serta sektor industri apa saja yang memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi. Hal tersebut bertujuan agar pembentukan KEK ini memiliki dampak positif, baik secara ekonomi maupun secara sosial, seperti halnya tujuan dari Kawasan Ekonomi Khusus itu sendiri, yaitu untuk menumbuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan membentuk pertumbuhan ekonomi baru di daerah pinggiran.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pelaksanaan penyelesaian koordinasi strategi pengembangan dan penetapan KEK adalah 90%. Target tahun 2025 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 33% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian s.d. TW I
IKU-3.3 Persentase Penyelesaian Koordinasi Strategi Pengembangan dan Penetapan KEK	%	90%	33%	36,67%

Indikator ini mengukur kajian pengembangan KEK yang diselesaikan terhadap kajian pengembangan KEK yang direncanakan. Indikator ini bertujuan untuk Melakukan penyusunan rencana strategis pengembangan wilayah dan memberikan rekomendasi pengembangan pada Kawasan Ekonomi Khusus yang berupa kajian masterplan KEK yang mengacu berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus. Capaian ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Kajian pengembangan KEK} = \frac{\Sigma \text{Kajian Pengembangan KEK yang diselesaikan}}{\Sigma \text{Kajian Pengembangan KEK yang direncanakan}} \times 100\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2025, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Kajian	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan laporan hasil kajian terkait pengembangan KEK. Laporan hasil kajian berupa verifikasi masterplan KEK.
2.	Melakukan koordinasi kajian dengan <i>stakeholder</i> terkait	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi kajian pengembangan KEK bersama <i>stakeholder</i> terkait

Pada Triwulan I Tahun 2025, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK melakukan kajian terkait pengembangan KEK yang meliputi koordinasi kajian dengan *stakeholder* terkait dan penyusunan verifikasi penyesuaian rencana tata ruang atau masterplan KEK seperti sebagai berikut:

No	Masterplan KEK	Status
1.	Masterplan KEK Tanjung Lesung	Telah diberikan <i>endorsement</i>
2.	Masterplan KEK Galang Batang	Telah diberikan <i>endorsement</i>

Pada Triwulan I Tahun 2025, Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersama dengan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) telah melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) dokumen masterplan KEK. Kedua penyesuaian masterplan tersebut memperoleh *endorsement* dari Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal 20 Maret 2025, dua dokumen penyesuaian Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memperoleh *endorsement* secara bersamaan dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Penyesuaian Masterplan KEK Tanjung Lesung memperoleh *endorsement* melalui Surat Nomor B/PD.01/38/SJ.DNKEK/03/2025, sedangkan penyesuaian Masterplan KEK Galang Batang mendapatkan *endorsement* melalui Surat Nomor B/PD.01/39/SJ.DNKEK/03/2025. Kedua dokumen ini telah melalui proses penyusunan yang komprehensif dan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Masterplan KEK.

Kajian mengenai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus juga dilakukan melalui forum diskusi dalam rangka penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat daerah, seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK terlibat langsung dalam diskusi-diskusi tersebut dengan tujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah secara konsisten mempertimbangkan keberlanjutan eksisting KEK maupun peluang pengembangan KEK baru di wilayah tersebut. Dengan demikian, pengembangan KEK dapat selaras dengan agenda pembangunan daerah serta memperoleh dukungan dari sisi kebijakan dan penganggaran.

Diskusi-diskusi tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah daerah setempat sebagai penyusun dokumen perencanaan, tetapi juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah. Kolaborasi ini penting untuk memastikan integrasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan pengembangan KEK yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi perekonomian daerah.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I 2025 belum terdapat kendala yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penyelesaian Koordinasi Strategi Pengembangan dan Penetapan KEK. Hal tersebut terlihat dari koordinasi kajian pengembangan KEK dan *endorsement* penyesuaian Masterplan KEK oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

4

Sasaran Program 4. Terwujudnya Rekomendasi Kualitas Kinerja Pelaksanaan Pengawasan Internal

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya rekomendasi kualitas kinerja pelaksanaan pengawasan internal yang dituangkan dalam indikator kinerja, yaitu

- 4.1 Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Capaian indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Latar Belakang

Penyelesaian Tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program kegiatan dengan baik. Pada pelaksanaannya, program kegiatan ini juga ditunjang dengan kegiatan administrasi program dan **Pelaksanaan** tata kelola yang merupakan suatu proses kebiasaan, kebijakan dan aturan yang memengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung dengan manajemen internal yang terpadu dan **Pengawasan Internal** terstruktur, sarana/prasarana kerja yang memadai, manajemen kepegawaian yang andal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK adalah 90%. Target tahun 2025 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 26 dari target 90% pada Tahun 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian s.d. TW I
IKU-4.1 Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	%	90%	23%	26%

Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK secara lebih lanjut menjadi indikator kinerja untuk mendukung peran strategis Bagian Pengawasan menjadi *strategic partner* dan *trusted advisor* yang dapat memberikan nilai tambah organisasi.

Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Gambaran aktivitas atas pelaksanaan pengawasan tersebut adalah perencanaan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan terhadap penyelenggaraan fungsi dan tugas organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator atau standar yang telah ditetapkan. Indikator ini dituangkan dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki peran sebagai instrumen *monitoring* dan kendali organisasi agar mampu mencapai tujuan atau target dari suatu organisasi bagi keseluruhan unit atau biro. Selama periode siklus tahunan yang direncanakan merupakan Kegiatan Pengawasan Internal meliputi *Monitoring* Pelaksanaan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Manajemen Risiko, dan lain-lain. Sedangkan pengawasan internal yang ditindaklanjuti merupakan kegiatan pengawasan internal yang diselesaikan pada periode tertentu.

Realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan internal diwujudkan dalam bentuk persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan internal yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{pelaksanaan pengawasan} = \frac{\sum \text{kegiatan pengawasan internal yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{kegiatan pengawasan internal yang direncanakan}} \times 100\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2025, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1.	Perencanaan Pengawasan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Bagian Pengawasan untuk tahun anggaran 2025
2.	Pelaksanaan pengawasan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan perhitungan fisik (<i>stock opname</i>) persediaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK periode Semester II tahun 2024 dan menyusun Berita Acara Hasil <i>Stock Opname</i> • Penyampaian permintaan progres terkait Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan 6 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu BPK RI atas Penyelenggaraan KEK Tahun 2019 s.d. 2023 kepada Kepala Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus melalui penyampaian nota dinas • Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan CPNS Tahun 2024 Tahap Pengumuman Kelulusan pada Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK; • Penyusunan dokumen pengadministrasian bagian pengawasan;

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Panel Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun Anggaran 2024 dengan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Pembahasan Jawaban atas Sanggah dari Peserta Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Tahun Anggaran 2024;
3. Pembahasan Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Tahun 2025-2029;
4. Pembahasan Peta Jabatan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2025 juga telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK memiliki pagu anggaran dari kegiatan Rekomendasi Pengawasan Internal, yang terdiri atas kegiatan Perencanaan Pengawasan Kelembagaan dan Pelaksanaan Pengawasan, yang hingga Triwulan I Tahun 2025, anggaran yang telah diserap sebesar 32,77% dari anggaran kegiatan yang diberikan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, kendala yang mempengaruhi ketercapaian rencana aksi di antaranya kekosongan posisi Kepala Bagian Pengawasan membuat beberapa program kegiatan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan membutuhkan arahan yang tepat terkait metode pelaksanaannya serta berdampak di koordinasi yang belum terlaksana secara maksimal, baik koordinasi secara internal maupun eksternal. Selain itu, kendala yang dihadapi juga berkaitan dengan belum ditetapkannya pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan Administrator KEK.

Upaya perbaikan dan peningkatan pencapaian target yang akan dilakukan, yaitu dengan meningkatkan koordinasi antar unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan koordinasi dengan Instansi/Kementerian/Lembaga Lainnya serta menetapkan pedoman dan SOP bagian pengawasan.

5

Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik

Pencapaian Sasaran Program 5 adalah terwujudnya tata kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK yang baik, yang dituangkan dalam indikator berupa Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

5.1 Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan	Latar Belakang
	Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus diambil dari penilaian terkait dengan aspek kualitas pelaksanaan kinerja perencanaan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu, tata kelola Biro Perencanaan juga

**Kawasan
Ekonomi
Khusus**

mencakup aspek kepuasan penyelenggaraan layanan, yang berkontribusi dalam mendorong terselenggaranya perencanaan dan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus secara efektif, akuntabel, serta mendukung penyerapan anggaran yang optimal. Pada pelaksanaannya, program kegiatan ini ditunjang dengan kegiatan mengukur kualitas atas pelaksanaan kinerja perencanaan dan pembentukan KEK serta mengukur Nilai Kinerja Anggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung dengan manajemen internal yang efektif dan efisien atas penggunaan anggaran dan ketercapaian *output* yang dihasilkan. Selain itu, Nilai Kinerja Anggaran digunakan untuk mengukur ketercapaian *output* serta nilai efisiensi dan efektivitas anggaran *output* yang dihasilkan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Program Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus senilai 3 (dari skala 4). Target tahun 2025 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi senilai 4,0 atau sebesar 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian s.d. TW I
IKU-5.1 Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus	nilai	3 (skala 4)	4,00	100%

Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus secara lebih lanjut akan mengukur kesesuaian terhadap beberapa indikator, diantaranya pada pelaksanaan tata kelola perencanaan, serta pelaksanaan tata kelola program dan anggaran. Penilaian kualitas tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelaksanaan kegiatan dari sisi kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku dalam lingkup Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK. Indeks tata kelola diperoleh dari persentase jumlah rencana kerja yang telah terlaksana dibandingkan dengan total rencana kerja yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, telah ditetapkan target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja dan triwulan. Target ini menjadi acuan dalam perhitungan indeks tata kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola anggaran yang baik. Implementasi pelaksanaan program Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK diukur berdasarkan formula perhitungan berikut:

$$\text{Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK} \\ = (\text{Capaian Realisasi Anggaran} \times 50\%) + (\text{Capaian Output} \times 50\%)$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2025, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk mengukur kualitas dan kesesuaian pelaksanaan kinerja perencanaan dan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus terdiri atas

capaian realisasi anggaran dan capaian *output*. Capaian realisasi anggaran berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional. Sedangkan capaian *output* menggambarkan capaian rincian output (RO) pada setiap kegiatan. Adapun pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Perencanaan	Terlaksana	Telah disusun Rencana Kerja TA 2025 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Penyusunan dilakukan melalui rapat internal pembahasan program kerja dan anggaran pada awal tahun anggaran, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian <i>output</i> secara efektif dan terukur. Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi, telah disusun <i>dashboard</i> kinerja yang memuat informasi capaian <i>output</i> .
2	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	Terlaksana	Melaksanakan <i>monitoring</i> anggaran secara periodik untuk memastikan akurasi penyerapan anggaran serta kesesuaian realisasi belanja dengan rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui revisi DIPA untuk menyesuaikan pagu yang diblokir karena efisiensi, sehingga anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan pagu yang tersedia.
3	Laporan Realisasi Anggaran	Terlaksana	Melakukan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang disertai analisis <i>trendline</i> bulanan untuk memantau progres serapan anggaran, mengetahui persentase realisasi per komponen maupun per kegiatan, serta menghitung

			sisa dana yang tersedia sepanjang tahun berjalan.
--	--	--	---

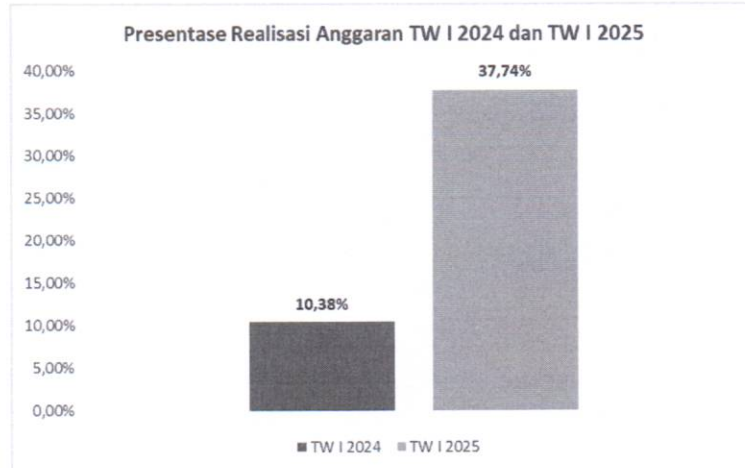
Berkaitan dengan rencana kerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK, telah dilakukan sejumlah langkah pendukung guna memastikan program berjalan dengan efektif dan efisien. Penyesuaian program dan anggaran dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dan menjaga agar pelaksanaan program tetap sesuai target yang telah ditetapkan. Program kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Koordinasi internal revisi DIPA 2025 untuk menyesuaikan pagu efisiensi dengan kebutuhan kegiatan;
2. Penyusunan dan Penyesuaian Rencana Kerja TA 2025 agar selaras dengan kebijakan dan anggaran tersedia;
3. *Monitoring* program secara periodik guna memastikan kesesuaian perencanaan dan capaian *output*;
4. Penyusunan laporan realisasi anggaran disertai *trendline* bulanan untuk memantau serapan dan sisa dana;
5. Penyusunan dan Penyampaian Narasi Kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK Triwulan I TA 2025
6. Penyampaian Penyesuaian *Quick Wins* Triwulan I TA 2025
7. Penyampaian Rencana Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana
8. Penyusunan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK
9. Penyusunan Rencana Anggaran Administrator
10. Koordinasi Audiensi dan Kajian Pengusulan KEK
11. Pembahasan Hasil Verifikasi Dokumen Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pada pelaksanaan tata kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK juga telah dilaksanakan pelayanan internal biro seperti terkait dengan pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, perencanaan kinerja program dan anggaran, sinkronisasi rencana kerja dan anggaran biro. Untuk aspek pelayanan ketatausahaan, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK senantiasa mengupayakan pengelolaan tata kelola administrasi yang efektif dan efisien melalui pengendalian arus surat. Pada Triwulan I Tahun 2025, rekapitulasi jumlah surat masuk telah tercatat sebanyak 185 surat. Sebanyak 100% telah ditindaklanjuti melalui pemberian disposisi dan bentuk tindak lanjut surat lainnya. Pada aspek kerumahtanggaan, pelayanan mencakup penyediaan kebutuhan konsumsi rapat guna mendukung kelancaran kegiatan operasional. Selain itu, agar program kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK berjalan dengan baik, juga dilakukan penyusunan Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus serta Pedoman Evaluasi Kelengkapan dan Pengkajian Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pada Triwulan I ini, besar anggaran yang telah terserap sebesar 2,78% dari keseluruhan pagu awal dan sebesar 37,74% dari pagu anggaran setelah blokir. Dari nilai tersebut, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK memiliki 2 Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu KRO Rekomendasi Perencanaan dan Pembentukan KEK dengan serapan anggaran sebesar 41,37% dari total anggaran yang diberikan dan KRO Rekomendasi Pengawasan Internal dengan serapan anggaran sebesar 32,77% dari total anggaran yang diberikan.

Grafik 1.1 Presentase Realisasi Anggaran TW I 2024 dan TW I 2025



Sumber: Data SP2D 2024-2025

Jika dibandingkan dengan Triwulan I 2024, realisasi anggaran hanya mencapai 10,38% sehingga terdapat peningkatan sebesar 27,36%. Pagu anggaran Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dengan kegiatan Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum Pengembangan dan Pembentukan KEK berubah setelah dilakukan *automatic adjustment*. Penyesuaian ini terdapat dalam Revisi ke 04 DIPA Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dengan nomor SP DIPA-035.01.1.427755/2025 tanggal 16 Juni 2025 untuk kebutuhan Belanja Pegawai melalui pembukaan blokir dan pergeseran belanja barang non perjalanan dinas. Penyesuaian anggaran melalui *automatic adjustment* tersebut berdampak pada perubahan alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan secara optimal.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I Tahun 2025 ini, kendala yang umum ditemui pada pelaksanaan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK berkaitan dengan ketidaksesuaian realisasi waktu pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan, yang disebabkan karena kondisi insidental dan prioritas yang berubah seiring dengan tingkat urgensi pada masing-masing kegiatan. Oleh karena itu, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK berupaya untuk terus memperbaiki hal tersebut agar kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dapat mencapai target, yaitu dengan melaksanakan rapat kerja, penyusunan *database monitoring*, dan pelaporan berkala.

Demikian laporan kinerja Triwulan I Tahun 2025 kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian target dan program yang ditetapkan. Kami tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan efisiensi, serta menyongsong tantangan dan peluang ke depan dengan penuh semangat dan dedikasi. Semoga laporan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan yang dicapai serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK yang lebih baik.

Jakarta, April 2025
Kepala Biro Perencanaan dan
Pembentukan KEK



Paulus Riyanto
NIP.197609212002121002

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Rapat Pembahasan Hasil Verifikasi Dokumen Masterplan KEK Galang Batang (7 Februari 2025)



Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, 2025

Lampiran 2. Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Hasil Verifikasi Dokumen Masterplan KEK Galang Batang (11 Februari 2025)



Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, 2025

**Lampiran 3. Pembahasan Prosedur Penyesuaian Masterplan KEK
(3 Maret 2025)**



Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, 2025